IMPLEMENTASI PROGRAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) MELALUI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS NG) DI DESA HUNTU KECAMATAN BATUDAA KABUPATEN GORONTALO

Sitrun Malipi[1], Muh Firyal Akbar[2] Sakbir[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
sitrunmalipi83@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the Implementation of the Social Welfare Integrated Data Program (DTKS) through the Next Generation Social Welfare Information System (SIKS NG) in Huntu Village, Batudaa District, Gorontalo Regency. The research method uses a qualitative approach by collecting data through observation, interviews and documentation. The results of the study show that of the four indicators, there are three indicators that are considered optimal, namely communication, disposition, and bureaucratic structure. Meanwhile, one other indicator, namely the resource indicator, is considered not optimal, which can be seen from the use of the Social Welfare System-Next Generation (SIKS-NG) application, which often experiences interruptions or errors when inputting data and the unstable network system in the Huntu rural area, especially in the Office Hunter Village

Keywords: Next Generation Social Welfare Information System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut, terdapat tiga indikator yang dianggap sudah optimal yakni komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara satu indikator lainnya yakni indikator sumber daya dianggap belum optimal dimana terlihat dari penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang seringkali mengalami gangguan atau error pada saat dilakukan penginputan data dan tidak stabilnya system jaringan di wilayah perdesaan Huntu khususnya di Kantor Desa Huntu

Kata Kunci: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation

PENDAHULUAN.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang telah memberikan solusi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan *E-goverment* dalam bidang birokrasi diharapkan mampu menjadi alternatif bagi perkembangan birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Dalam penerapan E-goverment dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merencanakan dan memulai hal baru dalam bidang pemerintahan. Dalam hal ini kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, regulasi dan anggaran dana menjadi hal mutlak yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan *E-government* (Indrajit, 2005)

Salah satu ciri yang terlihat di era kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi saat ini menurut Hage dan Power adalah dengan digunakannya teknologi komputer. *E-goverment* dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pemerintahan untuk meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat yang terbagi dalam beberapa tahap, tahap pertama yaitu persiapan, tahap kedua pematangan, tahap ketiga pemantapan dan tahap keempat pemanfaatan. Pengaplikasian sistem *E-govermnet* diharapkan dapat meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan transparan (Mustopadidjaja, 2003)

E-goverment dapat didefinisikan secara umum sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentranformasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi semakin lebih baik. E-Government bertujuan untuk membentuk tatanan pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan dan lebih akuntabilitas

Konsep *e-government* dapat dianalisis menggunakan tiga elemen keberhasilan egovernment yaitu elemen support, elemen capacity dan elemen value. Pada elemen Support atau dukungan, merupakan hal yang paling penting (Indrajit, 2005)

Tanpa adanya dukungan dari pejabat publik penerapan digitalisasi tidak akan terjadi, dukungan ini berbentuk inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government*. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan seperti : disepakatinya kerangka *e-government* sebagai kunci kesuksesan suatu negara untuk mencapai visi misi suatu negara: disosialisasikan konsep *e-government* secara merata dan konsisten serta menyuluh diseluruh kalangan birokrat secara khusus dan kepada masyarakat secara umum melalui kampanye simpatik. Sedangkan pada elemen capacity ini yang diperlukan dalam pembangunana dan pengembangan e- government agar konsep *e-government* dapat berjalan atau menjadi kenyataan ketersediaan sumber daya. Terdapat tiga sumber daya yang diperlukan untuk

mengimplementasikan *e-government* yaitu : ketersediaan sumber daya finansial atau dana yang cukup untuk mengimplementasikan *e-government*, ketersediaan insfratruktur teknologi informasi yang memadai, hal tersebut karena indikator keberhasilan *e-governmet* terdapat pada ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi yang memadai. ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai yang dibutuhkan untuk mengoperasikan *e-governemnt* agar sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Pada elemen value manfaat yang di dapat pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan *e-government*. (Yahya:2015)

Salah satu wujud dari penerapan e-government pada birokrasi pemerintah saat ini adalah penggunaan aplikasi layanan, dimana semua data base masyarakat terhimpun dalam satu system yang diakses secara digital seperti penggunaan aplikasi SIKS-NG. Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi manajemen Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melakukan pengusulan data baru dan perbaikan basis data terpadu masyarakat miskin. Di dalam aplikasi SIKS-NG juga terdapat menu untuk melakukan perbaikan dan pengusulan baru data penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP). Aplikasi ini digunakan untuk menghasilkan data ringkasan atau resume seperti rekapitulasi dan data hasil perbaikan serta pengusulan data baru. Proses pembaruan dan penginputan data dilakukan oleh petugas di Desa atau Kelurahan melalui aplikasi berbasis offline. Proses finalisasi data dilakukan setelah mendapat surat pengesahan dari dinas sosial setempat dan file hasil pembaruan data dapat langsung diunduh per periode

SIKS-NG adalah aplikasi berbasis offline yang digunakan untuk memasukkan data hasil verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang tidak memerlukan koneksi internet. SIKS-NG hanya digunakan untuk memperbarui data offline sehingga fungsi sinkronisasi atau upload data tidak diperlukan. Aplikasi SIKS-NG berbasis Offline dan Aplikasi SIKS-NG berbasis Online saling mendukung dalam verifikasi dan validasi data BDT. Munculnya program SIKS-NG ini diharapkan mampu mempermudah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan di masyarakat terkait pengusulan data yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran (Permensos No. 28/2017)

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah system informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Dengan aplikasi ini, diharapkan berbagai program bantuan sosial

kesejahteraan tepat pada sasaran sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial bersama Pemerintah Daerah. Menurut Sekjen Kementerian Sosial, aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variabel-variabel yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap

Terdapat beberapa program yang terimplementasi ke dalam aplikasi SIKS-NG seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI dalam meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) harus mampu di terjemahkan dan di implementasikan dengan baik khususnya di daerah yang menjadi sasaran kebijakan. Terimplementasinya suatu kebijakan di tentukan oleh beberapa variabel.

Implementasi kebijakan bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi merupakan salah satu tahap sejak dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan public. Edwar III dalam (Subarsono, 2011) menyatakan bahwasannya ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*Communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*depositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)"

Namun demikian, sejak digunakan di Pemerintahan Kabupaten Gorontalo khususnya pada Pemerintahan Desa, aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik dalam hal ini dianggap belum optimal dalam menghadirkan data yang berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Permasalahan yang kemudian muncul dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG adalah seperti dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG dari kemensos yaitu hasil input data

setelah dilaporkan ternyata banyak data yang belum valid dengan apa yang sudah dikerjakan oleh operator yang ada di Desa. Selain itu dari aplikasi setelah hasil kerja diekspor oleh petugas merasa kesulitan karena banyak fitur aplikasi yang kurang sempurna diantaranya tidak bisa mengetahui jumlah data masyarakat meninggal, masyarakat yang pindah, tidak ditemukan. Petugas atau operator aplikasi SIKS-NG di Desa harus menghitung ulang secara manual. Ini kemudian menjadi persoalan tersendiri karena dengan adanya aplikasi SIKS-NG ini, diharapkan data yang dibutuhkan bisa muncul secara otomatis. Aplikasi juga dirasa berat ketika dijalankan, ketika kaur pelayanan memasukan data secara terus menerus aplikasi mengalami error. Hal ini juga yang menghambat progress pelaksanaan BDT

Penelitian sebelumnya dari Husri, 2020. “Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial next generation di Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari sisi dalam ketepatan sasaran program masyarakat miskin dan anak terlantar terkait aplikasi program pendataan kesejahteraan sosial sudah berjalan dan sampai sekarang masih terus menggunakan aplikasi program pendataan, aspek sosialisasi program dinas sosial sudah melakukan sosialisasi program aplikasi pendataan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin, untuk pencapaian aplikasi program dinas sosial membuat komitmen dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan dengan bantuan dinas pemberdayaan masyarakat desa supaya proses pendataan melalui aplikasi SIKS-NG berjalan di kelurahan, desa dan kecamatan. Lalu untuk pemantauan setelah program yang dilakukan oleh dinas sosial sudah cukup efektif dengan memantau masyarakat miskin dan anak terlantar yang sudah di data dan diberikan bantuan setelah mereka diberdayakan, agar mereka memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan baik dan benar

Fatma Wati, 2022. “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM”. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian keseluruhan dari setiap variabel pengukuran tingkat efektivitas sistem informasi SIKS-NG pada kelurahan gunung seteleng berada pada kategori Efektif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis lebih melakukan pendalaman terhadap Implementasi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).

Berkaitan dengan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Arikunto (2013). Pendekatan kualitatif dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait dengan Implementasi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Sugiyono (2015) Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Adapun infroman dalam penelitian ini adalah; Kepala Desa Huntu sebagai informan kunci, Sekretaris Desa, Kepala Seksi 2 orang, Ketua BPD, Ketua LPM, Operator 1 orang dan masyarakat sebanyak 3 orang. Jumlah keseluruhan informan adalah 9 orang

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Semiawan, C. R. (2010) keseluruhan proses berlangsung pada saat penelitian dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dengan (a) Reduksi data (*Reduction Data*), (b) Penyajian data (*data display*), (c) Kesimpulan atau Vertivikasi (*Conclusion or Verification*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Komunikasi

Komunikasi menurut George C. Edward III (1980) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Bentuk komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah sosialisasi terkait dengan program yang akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat sebagai target group

Adapun indikator komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian

ini adalah sosialisasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Hasil wawancara dengan informan (SS) selaku Kepala Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa;

> "Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sudah seringkali disosialisasikan. Sosialisasi ini untuk memperkenalkan lebih dekat aplikasi SIKS-NG kepada TKSK dan korcam PKH, dimana aplikasi tersebut memuat informasi tentang basis data terpadu (BDT), penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, data bantuan pangan non tunai (BPNT) dan juga data penerima bantuan iyuran (PBI) jaminan kesehatan nasional". (wawancara 15 November 2022)

Wawancara selanjutnya dengan informan (HB) selaku Sekretaris Desa Huntu yang menyatakan bahwa;

> "sosialisasi sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Sosial melalui kegiatan Bimtek. Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah. Aplikasi ini memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegunaann aplikasi Siste m Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah menghadirkan data kemiskinan yang akurat". (wawancara 15 November 2022)

Selanjutnya dengan informan (YSP) selaku Ketua BPD Desa Huntu yang menyatakan bahwa;

> "untuk sosialisasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sudah pernah dilakukan, saat itu dilakukan di Kantor Camat Batudaa dengan menghadirkan seluruh operator desa se-Kecamatan Batudaa. Yang saya tahu bahwa saat itu dilakukan sosialisasi terkait pendataan dan pemutakhiran data masyarakat penerima bantuan". (wawancara 15 November 2022)

Selanjutnya wawancara dengan informan (SP) selaku Kasie Kesejahteraan yang menyatakan bahwa;

> "saya rasa sosialisasi terkait dengan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sudah cukup optimal karena selain memperkenalkan aplikasi ini, Dinas Sosial juga memberikan kegiatan bimbingan teknis khususnya kepada operator desa selaku pihak yang mengelola data penerima bantuan". (wawancara 15 November 2022).

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sudah optimal. Hal ini terlihat dari seringnya operator desa huntu terlibat dalam kegiatan sosialiasi dan bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik secara offline maupun secara online

Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Menurut George C. Edward III (1980), kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya

disebabkan oleh karena sumber daya yang tidak mencukupi, ataupun tidak memadai

Adapun sumber daya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Hasil wawancara dengan informan (SS) selaku Kepala Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa;

> "untuk sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal itu adalah jaringan. Hal ini memang seringkali dikeluhkan oleh operator pada saat akan melakukan penginputan data yang sangat mempengaruhi pemutakhiran informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)". (wawancara 18 November 2022)

Wawancara selanjutnya dengan informan (HB) selaku Sekretaris Desa Huntu yang menyatakan bahwa;

> "mungkin menurut saya sumber daya yang kurang mendukung dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah aplikasinya yang seringkali mengalami error pada saat operator melakukan pemutakhiran data. Selain itu jaringan juga di Desa Huntu ini, khususnya di Kantor Desa ini kurang stabil sehingga sangat menganggu proses pekerjaan operator". (wawancara 18 November 2022)

Selanjutnya dengan informan (LI) selaku Kasie Pelayanan yang menyatakan bahwa;

> "sumber daya dari sisi SDM dalam hal ini tentu saja operatornya sudah cukup baik, dengan kemampuan yang dimiliki dan pengetahuan yang di dapatkan dalam kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek) sudah cukup baik dalam mengoperasionalkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Yang sering bermasalah adalah aplikasinya yang susah untuk diakses atau mengalami error". (wawancara 15 November 2022)

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, sumber daya Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) belum optimal. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang seringkali mengalami gangguan atau error pada saat dilakukan penginputan data dan tidak stabilnya system jaringan di wilayah perdesaan Huntu khususnya di Kantor Desa Huntu

Disposisi

Disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar

implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Adapun sikap atau disposisi yang dimaksdukan dalam penelitian ini adalah perilaku para pelaksana program dalam mengimplementasikan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Hasil wawancara dengan informan (SS) selaku Kepala Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa;

> "kami selaku Pemerintah Desa ikut bertanggungjawab dalam mengimplementasikan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), kami berupaya secara maksimal memastikan pelaporan data yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Olehnya itu saya seringkali mengontrol kinerja dari operator kami dalam proses penginputan data masyarakat msikin pada Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) ". (wawancara 22 November 2022)

Wawancara selanjutnya dengan informan (IZ) selaku Ketua LPM Desa Huntu yang menyatakan bahwa;

> "saya rasa sikap pelaksana dalam hal ini Pemerintah Desa dan jajarannya termasuk operator sudah bekerja dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Kami juga terus melakukan pendampingan kepada operator untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengoperasionalkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan terus melakukan pengawasan kedisiplinan operator dalam melakukan pemutakhiran". (wawancara 18 November 2022)

Selanjutnya dengan informan (LI) selaku Kasie Pelayanan yang menyatakan bahwa;

> "khusus untuk sikap pelaksana saya rasa sudah cukup baik, Dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada operator desa, begitu juga dengan Pemerintah Desa Huntu yang terus berupaya memaksimalkan proses pemutakhiran data masyarakat penerima bantuan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)". (wawancara 15 November 2022)

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, disposisi atau sikap pelaksana dalam penggunaan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sudah optimal. Hal ini terlihat dari kesungguhan Pemerintah Desa Huntu dalam memastikan data yang akan dilaporkan atau yang akan di input dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sudah sesuai dengan kondisi factual di lapangan

Struktur Birokrasi

Subarsono (2011) mengatakan bahwa **"**Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah struktur organisasi pelaksana".

Adapun struktur birokrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keberadaan satuan tugas dalam rangka mendukung dan melaksanakan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Hasil wawancara dengan informan (SS) selaku Kepala Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa;

> "kalau struktur kerja dalam penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) tidak ada, jadi semua melekat pada struktur yang ada di Pemerintah Desa, dimana Kepala Desa selaku penanggungjawab yang bertugas memastikan operator desa bekerja dengan baik". (wawancara 22 November 2022)

Wawancara selanjutnya dengan informan (IZ) selaku Ketua LPM Desa Huntu yang menyatakan bahwa;

> "tidak ada struktur kerja khusus dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang ada adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya antara Pemerintah Desa Huntu dengan Dinas Sosial, Pendamping dan operator desa". (wawancara 18 November 2022)

Selanjutnya dengan informan (YSP) selaku Ketua BPD Desa Huntu yang menyatakan bahwa;

> "struktur kerja dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) itu sudah melekat pada struktur kerja yang ada pada Pemerintah Desa Huntu". (wawancara 15 November 2022)

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, tidak ada struktur birokrasi dalam penggunaan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Meskipun demikian, dalam implementasi penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) didukung oleh koordinasi yang baik antar lini organisasi mulai dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Pendamping, Pemerintah Desa hingga operator desa

PEMBAHASAN

Komunikasi

Menurut Edward III (1980), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Winarno (2002) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan

kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan

Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun indikator komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sosialisasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa kegiatan sosialisasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sudah sering dilakukan. Hal ini berdasarkan temuan peneliti terkait adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimtek Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang di adakan di Kantor Camat Batudaa yang dibuktikan dengan catatan-catatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimtek seperti absensi kegiatan, isi kegiatan, dokumentasi seperti foto-foto kegiatan sosialisasi dan bimtek Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG)

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sudah optimal. Hal ini terlihat dari seringnya operator desa huntu terlibat dalam kegiatan sosialiasi dan bimtek yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik secara offline maupun secara online

Sumber Daya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Terdapat berbagai macam sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan yang dapat atau sangat menentukan proses implementasi kebijakan atau suatu program

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana

sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan. Salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumber daya fasilitas". Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

Adapun sumber daya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG dari kemensos yaitu hasil input data setelah dilaporkan ternyata banyak data yang belum valid dengan apa yang sudah dikerjakan oleh operator yang ada di Desa. Selain itu dari aplikasi setelah hasil kerja diekspor oleh petugas merasa kesulitan karena banyak fitur aplikasi yang kurang sempurna diantaranya tidak bisa mengetahui jumlah data masyarakat meninggal, masyarakat yang pindah, tidak ditemukan. Petugas atau operator aplikasi SIKS-NG di Desa harus menghitung ulang secara manual. Ini kemudian menjadi persoalan tersendiri karena dengan adanya aplikasi SIKS-NG ini, diharapkan data yang dibutuhkan bisa muncul secara otomatis. Aplikasi juga dirasa berat ketika dijalankan, ketika operator memasukan data secara terus menerus aplikasi mengalami error. Hal ini juga yang menghambat progress pelaksanaan BDT

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, sumber daya Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) belum optimal. Hal ini terlihat dari penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang seringkali mengalami gangguan atau error pada saat dilakukan penginputan data dan tidak stabilnya system jaringan di wilayah perdesaan Huntu khususnya di Kantor Desa Huntu

Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III (1980) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Adapun sikap atau disposisi yang dimaksdukan dalam penelitian ini adalah perilaku para pelaksana program dalam mengimplementasikan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa Huntu beserta jajarannya, dimana Pemerintah Desa terus berupaya memastikan data yang akan dilaporkan atau yang akan di input dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sudah sesuai dengan kondisi factual di lapangan. Begitu halnya dengan operator desa yang sangat berhati-hati dalam melakukan pelaporan atau penginputan data masyarakat penerima bantuan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, disposisi atau sikap pelaksana dalam penggunaan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) sudah optimal. Hal ini terlihat dari kesungguhan Pemerintah Desa Huntu dalam memastikan data yang akan dilaporkan atau yang akan di input dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sudah sesuai dengan kondisi factual di lapangan

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III (1980) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya

Struktur organisasi yang bertugas untuk melakukan implementasi kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan atau program. Dalam peraturan perundang-undangan struktur birokrasi didefinisikan pada sebuah unit kerja yang akan mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Adapun struktur birokrasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keberadaan satuan tugas dalam rangka mendukung dan melaksanakan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di

Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa tidak ditemukan adanya struktur kerja dalam program atau penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Yang ada adalah koordinasi secara top-down mulai dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Pendamping, Pemerintah Desa hingga operator desa. Pertanggunjawaban kegiatan melekat pada pimpinan masing-masing instansi, misalnya di Pemerintah Desa Huntu yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi. Tugasnya adalah memastikan operator desa bekerja dengan baik dengan melakukan penginputan berdasarkan kondisi faktual masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas, serta hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, tidak ada struktur birokrasi dalam penggunaan Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Meskipun demikian, dalam implementasi penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) didukung oleh koordinasi yang baik antar lini organisasi mulai dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, Pendamping, Pemerintah Desa hingga operator desa

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo sudah optimal. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi Edwar III dalam Subarsono (2011) dengan indicator diantaranya; (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, serta (4) struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator tersebut, terdapat tiga indikator yang dianggap sudah optimal yakni komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara satu indikator lainnya yakni indikator sumber daya dianggap belum optimal dimana terlihat dari penggunaan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang seringkali mengalami gangguan atau error pada saat dilakukan penginputan data dan tidak stabilnya system jaringan di wilayah perdesaan Huntu khususnya di Kantor Desa Huntu

Berdasarkan hasil penelitian, terkait Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo, maka ditawarkan saran sebagai berikut: (1) Perlunya Pemerintah Desa Huntu untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait

penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu untuk menghindari kesalahan persepsi di masyarakat; (2) Perlunya Pemerintah Desa Huntu untuk melakukan perbaikan terhadap dukungan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu khususnya pengadaan jaringan yang lebih memadai; (3) Perlunya struktur kerja dalam penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Desa Huntu

DAFTAR PUSTAKA

AG Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta. Bandung.

Arikunto, S, (2013) Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, edisi revisi, Bumi Aksara, Yogyakarta

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press

Indrajit, Richardus Eko (2005). *E-Government in action.* Yogyakarta:Andi Offset

Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. (2002). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Presindo:Yogyakarta